



# PENERAPAN KONSEP ***“PLEA BARGAINING”***

Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)  
dan Manfaatnya bagi Sistem Peradilan Pidana  
di Indonesia

Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.

Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H.



# PENERAPAN KONSEP “PLEA BARGAINING”

Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)  
dan Manfaatnya bagi Sistem Peradilan Pidana  
di Indonesia

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) di Indonesia selama ini ternyata tidak mampu mengatasi terjadinya penumpukan perkara pidana di pengadilan. Di samping adanya laporan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai banyaknya penumpukan perkara pidana di lembaga peradilan, terdapat pula penelitian yang menunjukkan bahwa hakim di Indonesia ternyata memiliki kecenderungan menjatuhkan banyak putusan pemidanaan terhadap perbuatan pidana dengan ancaman pidana ringan.

Konsep *Plea Bargaining* yang telah dikenal dan diterapkan di beberapa negara juga akan dimasukkan ke dalam pasal 198 ayat 5 dan 199 RKUHAP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) di Indonesia yang sebentar lagi akan diundangkan. Sekalipun tidak secara *explicit verbis* dinamakan dengan *Plea Bargaining*, namun *spirit* dari pasal-pasal tersebut mempunyai kemiripan dengan sistem *Plea Bargaining* yang selama ini dipraktikkan di banyak negara dan dianggap berhasil untuk mengatasi penumpukan perkara pidana di pengadilan.



Penerbit Deepublish (CV BUDI UTAMA)  
Jl. Rajawali, Gang Elang 6 No.3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman  
Jl. Kaliurang Km 9,3 Yogyakarta 55581  
Telp/Fax : (0274) 4533427  
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)  
cs@deepublish.co.id @penerbitbuku\_deepublish  
Penerbit Deepublish www.penerbitbukudeepublish.com

Kategori : Hukum

ISBN 978-623-02-0904-8



9 786230 209048



## DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH .....	v
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang Masalah .....	1
2. Rumusan Masalah .....	7
3. Tujuan Penelitian.....	7
4. Metode Penelitian.....	7
<b>BAB II HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>9</b>
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>12</b>
1. Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Dalam Perumusan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP).....	12
2. Tentang Sistem <i>Plea Bargaining</i> dan Penerapannya di Indonesia.....	20
3. Penilaian “Pengakuan Bersalah” sebagai Alat Bukti yang Sah dan Menyempurnakan .....	27
4. Manfaat <i>Plea Bargaining</i> sebagai di dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia .....	34
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>39</b>
1. Kesimpulan .....	39
2. Saran .....	40
DAFTAR PUSTAKA .....	41
BIODATA PENULIS .....	46

Penulis

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Adanya perkembangan dunia hukum pidana khususnya terkait dengan hukum acara pidana (*criminal procedure system*) secara global, terutama setelah dilakukannya beberapa kali Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menjadi dasar adanya perubahan orientasi pemidanaan, antara lain dalam Kongres PBB ke-9 tahun 1995, dalam dokumen penunjang yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana mengungkapkan perlunya semua negara mempertimbangkan “*privatizing some law enforcement and justice functions*” dan “*alternative dispute resolution (ADR)*” untuk mengatasi problem kelebihan muatan (penumpukan perkara) di pengadilan.<sup>1</sup> Berdasarkan perkembangan ini, maka pada saat usaha hukum pidana (materiel) digalakkan, seharusnya Indonesia memperbaharui sistem pemidanaannya yang kaku dan imperatif tersebut menjadi sistem pemidanaan yang mengedepankan aspek kemanusiaan yang menjunjung tinggi keadilan. Hal ini juga sejalan dengan perumusan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah memasuki tahap akhir dalam pembahasannya.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Jakarta: Kencana, 2007), h. 82-86. Lihat juga Barda Nawawi Arief, “Mediasi Pidana: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan”, (*Online*), tersedia di: <http://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-diluar-pengadilan/2009> (24 Maret 2018). (diakses pada 12 Nopember 2019).

<sup>2</sup> Tim Penyusun. “Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hasil Pembahasan Panitia Kerja RKUHP-DPR RI”, 25 September 2019, Jakarta: BPHN & Menkumham, (selanjutnya disebut “RKUHP”).

Sementara itu, tujuan pemidanaan merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan hukum pidana, bukan hanya di Indonesia akan tetapi bahkan di seluruh dunia. Hal ini disebabkan bahwa perkembangan peradaban suatu bangsa, di antaranya juga ditentukan oleh sejauh manakah perlakuan bangsa yang bersangkutan terhadap terpidananya. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa tujuan pemidanaan merupakan pencerminan dari falsafah suatu bangsa.<sup>3</sup>

Berdasarkan perumusan pada Alinea keempat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945<sup>4</sup> dapat diketahui adanya tujuan “perlindungan masyarakat” (*social defence*) dan “kesejahteraan masyarakat” (*social welfare*), yang harus tercermin dalam tujuan pembangunan nasional. Di samping keharusan untuk melakukan harmonisasi terhadap perkembangan hukum yang bersifat universal demi ketertiban hukum antar bangsa di era globalisasi yang bersifat multidimensional.<sup>5</sup>

Dengan kata lain pembaharuan hukum pidana harus menjadi sarana untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Materi hukum pidana nasional harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menciptakan keseimbangan berdasarkan nilai moral religius Ketuhanan yang

<sup>3</sup> Romli Atmasasmita. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi* (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 90.

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009), h. 43. Kedua istilah ini pun sering dipadatkan dalam satu istilah saja, yaitu “*social defence*”, karena di dalam istilah “perlindungan masyarakat” sudah tercakup juga “kesejahteraan masyarakat”.

<sup>5</sup> Muladi. “Hukum, Globalisasi dan HAM”. (Ceramah yang disampaikan di PDJH Undip, Semarang, 7 November 2014).

Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terkait dengan pembaharuan hukum pidana, paling tidak terdapat dua tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana, yaitu tujuan ke dalam dan tujuan keluar. Tujuan ke dalam, adalah pembaharuan hukum pidana dilakukan sebagai sarana untuk perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, di mana tujuan tersebut sebagai batu landasan (*cornerstone*) dari hukum pidana<sup>6</sup> dan pembaruan hukum pidana. Sedangkan tujuan keluar adalah ikut serta menciptakan ketertiban dunia sehubungan dengan perkembangan kejahatan internasional (*international crimes*).<sup>7</sup> Perlindungan masyarakat (*social defence*) dengan penegakan hukum dalam pidana dan pembaharuan pidana yang dilaksanakan dengan tujuan.<sup>8</sup>

1. Perlindungan masyarakat dari perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat, maka tujuan pemidanaan adalah mencegah dan menanggulangi kejahatan.
2. Perlindungan masyarakat dari sifat kejahatannya seseorang, maka pidana/pemidanaan dalam hukum pidana bertujuan memperbaiki pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
3. Perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya, maka tujuan pidana dirumuskan untuk mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan sewenang-wenang di luar hukum.
4. Perlindungan masyarakat dari gangguan keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai akibat dari adanya

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Tujuan Pemidanaan*, *Op. Cit.*, h. 45.

<sup>7</sup> Kittichaisaree. *International Criminal Law* (Oxford: Oxford University Press, 2001), h. 3.

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Tujuan Pemidanaan*, *Op. Cit.*, h. 45-46.

kejahatan, maka penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Perlindungan masyarakat dalam hal ini mencakup pula secara khusus perlindungan korban kejahatan (*victim of crime*), yang setelah perang dunia kedua mengemuka. Korban dalam hal ini mencakup pula korban “*abuse of power*”, yang harus memperoleh perlindungan.

Sebagai bagian dari aspek peminanaan, keberadaan “putusan hakim” mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan dalam lembaga peradilan pidana. Putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang “statusnya”, sedangkan di pihak lain, putusan hakim merupakan “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim.<sup>9</sup>

Sejalan dengan orientasi peminanaan di atas, maka dalam perkembangan hukum pidana di dunia termasuk di dalamnya hukum acara pidana yang di dalamnya mengatur mengenai lembaga peradilan pidana, dikenal suatu sistem yang dinamakan dengan sistem *Plea Bargaining*. *Plea Bargaining System* is “*A negotiated agreement between a prosecutors and a criminal defendant whereby the defendant pleads guilty to lesser offense or to one of multiple charges in exchange for some concession by the prosecutor, more lenient sentence or dismissal of the other charges.*”<sup>10</sup>

*Plea Bargaining System* telah dikenal dan dipraktikkan di banyak negara, baik yang menganut *common law* maupun *civil law*, karena dianggap telah membawa manfaat dan mendorong peradilan

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h. 129.

<sup>10</sup> Black's Law Dictionary with Pronouncements, Sixth Edition (Boston: St. Paul. Minn West Group, 1990), h. 1152.

pidana menjadi lebih efisien dan efektif serta menghindari adanya penumpukan perkara (*case load*) yang masuk ke pengadilan. Menurut Gaby Del Vale, <sup>11</sup> “97 % of federal criminal convictions that result from guilty pleas instead of trials, in 2017”. Sementara menurut Dylan Walsh, “In 2015, excluding cases that were dismissed, only 72 % of criminal defendants in Philadelphia pled guilty, as opposed to 97 % federally; 15 % pursued a bench trial”.<sup>12</sup> Penerapan sistem *Plea Bargaining* di Amerika Serikat (US) secara mayoritas mampu menyelesaikan perkara yang dengan angka yang sangat signifikan.

Sementara itu, dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, pemeriksaan perkara pidana seringkali berlangsung lama, berbelit-belit dan rumit, memakan biaya mahal dan tidak sederhana seperti disebutkan aturan-aturan normatif/formal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sehubungan dengan hal ini, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa “berperkara di pengadilan, akan hilang seekor sapi untuk mengurus hilangnya seekor ayam”. Hal ini tentunya sangat tidak diharapkan oleh masyarakat, khususnya bagi para pencari keadilan dalam penyelesaian perkara-perkara pidana yang dialaminya.

Berdasarkan laporan yang ada, Mahkamah Agung (MA) di Indonesia mendapat kritikan keras, salah satunya terkait jumlah perkara yang menumpuk. Lembaga peradilan tertinggi itu menunggak hingga puluhan ribu perkara. Padahal, pencari keadilan sudah belasan, bahkan puluhan tahun menunggu keadilan.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Gaby Del Vale, *Most criminal cases end in plea bargains, not trials*, (Online), tersedia di <https://theoutline.com/post/2066/most-criminal-cases-end-in-plea-bargains-not-trials>, 7 Agustus 2017. (diakses pada 12 Nopember 2019).

<sup>12</sup> Dylan Walsh, “Why U.S. Criminal Courts Are So Dependent on Plea Bargaining”, (Online), tersedia di <https://www.theatlantic.com/politics/archive/2017/05/plea-bargaining-courts-prosecutors/524112/>, (diakses pada 12 Nopember 2019).

<sup>13</sup> “Terlambat Beri Keadilan adalah Ketidakadilan Juga”, (Online), tersedia di <http://alummi.unair.ac.id/site/article/read/422/terlambat-beri-keadilan-adalah-ketidakadilan-html>, (diakses pada 10 Nopember 2019).



Sistem penanganan perkara yang diterapkan di Indonesia saat ini menghabiskan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Tahapan penanganan perkara pidana dilakukan dengan serangkaian proses yang tidak mudah, di mana dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), terdiri atas proses penyidikan, penuntutan, pengadilan, pelaksanaan putusan hakim, dan pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan.<sup>14</sup> Padahal Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman telah mengamanatkan, bahwa peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>15</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas, maka harus ada perubahan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Perubahan tersebut dapat dimulai dari KUHAP sebagai ketentuan formal.

Dalam perkembangannya, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) telah memasukkan pengaturan akan lembaga "*Plea Bargaining*" atau yang dikenal dengan "pengakuan bersalah melalui 'jalur khusus'"<sup>16</sup> sebagaimana yang diatur dalam Pasal 198 ayat (5) dan Pasal 199. Pengaturan ini memberikan kemungkinan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana dengan ancaman pidana maksimal terhadap terdakwa yang telah mengakui melakukan suatu tindak pidana. Sekalipun tidak secara *expliciti verbis* menyatakan adanya lembaga *Plea Bargaining* yang selama ini dikenal di banyak negara, namun demikian, spirit dari konsep ini mempunyai kemiripan dengan sistem *Plea*

*Bargaining* yang telah dipraktikkan di banyak negara. Selanjutnya, diharapkan dengan akan adanya konsep *Plea Bargaining* atau "pengakuan bersalah melalui 'jalur khusus'" ini, maka dapat memberikan manfaat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

## 2. Rumusan Masalah

Penelitian yang berjudul Penerapan Konsep *Plea Bargaining* Di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dan Manfaatnya Di dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, dapat diarahkan kepada 2 (dua) hal pokok sebagai berikut.

- a. Bagaimana penerapan sistem *Plea Bargaining* di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) di Indonesia?
- b. Bagaimana manfaat dari penerapan sistem *Plea Bargaining* di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?

## 3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini semata-mata difokuskan kepada:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem *Plea Bargaining* di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) di Indonesia.
- b. Untuk memahami manfaat dari penerapan sistem *Plea Bargaining* di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

## 4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe fenomenologi. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder berupa studi pustaka, didukung dengan berbagai informasi yang aktual dari media informasi. Hasil penelitian ini disajikan dengan mendeskripsikan penerapan konsep *Plea Bargaining* di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang

<sup>14</sup> *Tolib Effendi. Prinsip Opportunitas dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, dalam buku Bunga Rampai Kejaksaa Republik Indonesia (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015), h. 322.*

<sup>15</sup> Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Tabela, 2002), h. 33.

<sup>16</sup> Istilah "Pengakuan bersalah melalui 'jalur Khusus'" digunakan penulis semata-mata untuk mempermudah pemahaman mengenai konsep yang mirip dengan istilah "*Plea Bargaining*" yang selama ini digunakan di negara-negara lain, oleh karena RKUHAP sendiri tidak memberikan judul terhadap ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 198 ayat (5) dan 199 RKUHAP.

## BAB IV PENUTUP

### 1. Kesimpulan

- a. Pada dasarnya *Plea Bargaining System* yang berarti proses negosiasi antara jaksa penuntut umum dan terdakwa dalam hal terdakwa mengaku bersalah untuk mendapatkan keringanan hukuman, ternyata telah banyak diterapkan di banyak negara. Sementara Indonesia dengan sedikit memodifikasi sistem *Plea Bargaining* menjadi “pengakuan bersalah melalui ‘jalur khusus’” akan menerapkannya dalam Pasal 198 ayat (5) dan Pasal 199 RKUHAP yang sebentar lagi akan diundangkan.
- b. Banyaknya negara menerapkan sistem *Plea Bargaining* didasarkan banyaknya manfaat yang diperoleh dari penerapan sistem ini, antara lain sistem ini dianggap berhasil menekan penumpukan perkara yang terjadi di pengadilan, di samping juga sistem ini dianggap mampu mempercepat proses penyelesaian perkara pidana yang ada. Hal ini juga selaras dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan bahwa peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan yang selama ini belum terwujud dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, antara lain tergambar dari hasil penelitian yang dilakukan di dalam tulisan ini. Sekalipun memang ada beberapa kekurangan dalam penerapan konsep ini yang memerlukan kajian lebih lanjut ini dalam sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia.



## 2. Saran

- a. Keberhasilan penerapan *Plea Bargaining System* di banyak negara berikut manfaat yang ada seharusnya mempercepat penerapan sistem ini dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, di mana percepatan ini seharusnya mendapatkan dukungan seluruh pihak yang ada.
- b. Sekalipun penerapan *Plea Bargaining System* ini dianggap berhasil di banyak negara, namun dalam penerapannya di Indonesia mesti diadaptasikan dengan sistem hukum pidana yang ada, sehingga sistem yang berupa konsep dalam RKUHAP ini dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Amahoruddin. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Artel, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009).
- Atmasasmita, Romli. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi* (Bandung: Mandar Maju, 1995)
- \_\_\_\_\_. *Sistem Peradilan Pidana. Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*. Bandung: Binacipta, 1996.
- Bakhri, Syaiful. *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Black's Law Dictionary With Pronunciations, sixth edition. Boston: St. Paul. Minn West Group, 1990.
- Effendi, Tolib. *Prinsip Oportunitas dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, dalam buku Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015.
- Flynn, Asher dan Kate Fitz-Gibbon. *Bargaining with Defensive Homicide Examining Victoria's Secretive Plea Bargaining System Post-Law Reform*. Melbourne: Melbourne University Law Review, 2011.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisah Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.